

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Surabaya

Struktur organisasi pemerintahan desa di Propinsi Djawa Tengah, 1971 *Struktur organisasi pemerintahan desa dalam Propinsi Jawa Timur* **Perilaku Kebijakan Organisasi PKn Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi untuk Pelayanan Publik** Pengantar Otonomi Daerah dan Desa Sistem Pemerintahan Tata Kelola Pemerintahan Desa **Desain Inovasi Pemerintahan Daerah Regulasi Desa** Sistim pemerintahan kota dan pola pokok struktur organisasi administrasi **PKn-Pend.Kewarganeg SD/MI Kls 4 Handbook Pemerintahan Daerah Manajemen Strategis MANAJEMEN PEMERINTAHAN Korupsi Mengorupsi Indonesia Hukum Administrasi Negara Akuntansi Sektor Publik Good Governance dalam Pelayanan Publik** *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence* *Memimpin Reformasi Birokrasi Korupsi APBD FORMULASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)* **Manajemen Perkotaan** *Manajemen Pemerintahan Desa Indonesia dalam Era Disrupsi* **Gagasan Manajemen Sejarah pengaruh Pelita terhadap masyarakat pedesaan di Nusa Tenggara Barat** *Mimbar Panduan Belajar Dan Evaluasi: Pendidikan Kewarganegaraan: Untuk SD/MI Kelas 4 Sejarah Departemen Tenaga Kerja, Republik Indonesia* *Manajemen Pelayanan Publik Menuju Indonesia Makmur yang Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan Melaksanakan Nilai-Nilai Agama dalam Keragaman Agama (Dua Puluh Dua Tahap Membangun Negeri)* **Pertumbuhan pemerintahan daerah di negara Republik Indonesia** **Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia Edisi Kedua Birokrasi Politik & Pemilihan Umum Di Indonesia** *Administrasi negara BIROKRASI DAN GOVERNANSI PUBLIK Good Corporate Governance (GCG) Pemerintahan Desa (Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan Desa)*

Thank you extremely much for downloading **Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Surabaya**. Most likely you have knowledge that, people have see numerous period for their favorite books later than this Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Surabaya, but end going on in harmful downloads.

Rather than enjoying a fine ebook taking into account a cup of coffee in the afternoon, instead they juggled once some harmful virus inside their computer. **Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Surabaya** is comprehensible in our digital library an online right of entry to it is set as public correspondingly you can download it instantly. Our digital library saves in merged countries, allowing you to get the most less latency epoch to download any of our books in the manner of this one. Merely said, the Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Surabaya is universally compatible taking into consideration any devices to read.

Birokrasi Politik & Pemilihan Umum Di Indonesia Oct 25 2019 Referensi ini menyajikan dan membahas tidak hanya analisis teori, tetapi juga fakta aktual yang terjadi di ranah politik di Indonesia. Buku ini berisi topik utama kajian ilmu politik dan pemerintahan: (1) Politik Birokrasi; (2) Administrasi Publik dan Birokrasi Pemerintahan; (3) Birokrasi dan Partai Politik; (4) Partai Politik dan Pemilihan Umum; (5) Partai Politik dan Birokrasi Pemerintahan di Indonesia; dan (6) Aspek Kelembagaan dalam Birokrasi Pemerintah Sipil. Buku persembahan penerbit Prenada Media

MANAJEMEN PEMERINTAHAN Aug 15 2021 Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan diperlukan untuk menggerakkan berbagai aktivitas pemerintahan, baik penyelenggaraan pemerintahan dalam arti luas yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maupun penyelenggaraan pemerintahan dalam arti sempit yang dijalankan oleh eksekutif. Pemerintah dan pemerintahan ke dalam arti luas dan arti sempit, yaitu: Pemerintah dalam arti luas menunjuk kepada aparatur negara, alat-alat perlengkapan negara seluruhnya sebagai kesatuan yang melaksanakan seluruh tugas dan kekuasaan negara atau pemerintahan dalam arti luas. Sedangkan, pemerintah dalam arti sempit menunjuk kepada aparat, organ atau alat perlengkapan negara yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas, yaitu segala aktivitas tugas atau kewenangan atau kekuasaan negara. Jika mengikuti pembagian Montesquieu, pemerintahan dalam arti luas, meliputi bidang-bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Hukum Administrasi Negara Jun 13 2021 Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang mengatur fungsi pemerintah (Hukum Administrasi Negara Heteronom) dan sekaligus terdiri dari serangkaian norma hukum yang diciptakan oleh pemerintah (Hukum Administrasi Negara Otonom). Para ahli melihat semakin pentingnya Hukum Administrasi Negara untuk menjaga tegaknya pilar negara hukum (rechtstaat dan rule of law). UUD Negara RI 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum tanpa memberikan atribut rechtstaat seperti di masa lalu. Dengan demikian, meskipun secara historis Hukum Administrasi Negara di Indonesia tumbuh di atas fondasi sistem negara hukum rechtstaat, namun, dapat diisi dan dilengkapi dengan prinsip-prinsip rule of law. Substansi bukum ini memadukan konsep-konsep Hukum Administrasi Negara baik yang berkembang di atas fondasi rechtstaat di Eropa maupun di atas fondasi rule of law di Anglo Saxon.

Good Governance dalam Pelayanan Publik Apr 11 2021 Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Good Governance. Sistematika buku Good Governance dalam Pelayanan Publik ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 11 Bab, diantaranya: Pelayanan Publik; Good Governance; Birokrasi; Otonomi Daerah; Konsep Dasar Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah; Pelayanan yang Bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme); Pelayanan Publik yang Efisien, Efektif dan Responsif; Pelayanan Publik Partisipatif; Transparansi Pelayanan Publik; Strategi Reformasi Birokrasi di Indonesia; Serta Kaitan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik.

Perilaku Kebijakan Organisasi Aug 27 2022 Buku ini membahas isu kebijakan semenjak perubahan era baru dalam penerapan kebijakan organisasi. Misalnya program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang ditandatangani oleh pemerintah pusat atau dengan kata lain sejak garis kebijakan vertikal menjadikan kebijakan program BKKBN, Termasuk isu kebijakan yang sering diberitakan bahwa sejak program BKKBN ini iotonomikan terdapat banyak pegawai dan tenaga penyuluh BKKBN yang melakukan mutasi pindah ke instansi lain sebagai dampak dari banyaknya karyawan yang melakukan mutasi umumnya adalah tenaga yang telah terlatih dan menguasai pekerjaan penyuluh BKKBN sebagai aset dalam pengembangan program kelembagaan mengalami pengurangan. Isu kebijakan program kelembagaan di era otonomi pemerintahan daerah, terdapat adanya berbagai kesenjangan (gap) dalam pelaksanaan tugas yang diemban terhadap publik, khususnya dalam pendampingan dan pemberian penyuluhan Kelembagaan di tingkat kabupaten dan kota yang ditempatkan di kecamatan dan desa. Sebelum kebijakan otonomi pemerintah daerah dalam satu kecamatan terdapat lebih dari dua orang Petugas Penyuluh Lapangan BKKBN yang mengkoordinir Penyuluh Lapangan Desa (PLD), saat ini telah ditetapkan hanya satu orang di kecamatan. Termasuk PLD BKKBN sebelum otonomi pemerintahan daerah, 1 orang PLD BKKBN menangani satu desa, tetapi saat ini 1 orang PLD BKKBN desa menangani tiga sampai empat desa, sehingga tidak efektif dalam melakukan pembinaan, pencerahan dan penyuluhan kepada publik khususnya masyarakat yang rentang dengan reproduksi. Bagi pemerintah kabupaten/kota, program kelembagaan adalah program bupati/walikota yang tentunya kebijakan yang dikeluarkan harus mendukung kebijakan utama yang menjadi prioritas dari bupati/walikota yang saat ini nampaknya program kelembagaan bukan lagi sebagai program prioritas, melainkan program pendukung kebijakan bupati/walikota, menjadi wajar jika jumlah penduduk bertambah, kesehatan masyarakat mengalami perubahan yang stagnan dan tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan, sehingga nampaknya program kelembagaan mengalami pengabaian dari program-program pemerintah yang berskala prioritas, terkalahkan dengan kebijakan program peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai program kebijakan prioritas pemerintah daerah.

PKn Jul 26 2022

Pemerintahan Desa (Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan Desa) Jun 20 2019 Buku ini menjelaskan pembangunan desa dari aspek perencanaan yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ditunjukkan secara gamblang bagaimana proses perencanaan pembangunan desa dengan adanya pelibatan partisipasi masyarakat di dalamnya. Buku ini menjelaskan bagaimana partisipasi masyarakat yang ada dikaitkan perencanaan pembangunan di desa dan partisipasi masyarakat yang berkembang di desa pedesaan atau desa yang masih memelihara karakteristik desanya sebagai desa pedesaan dan desa kota atau desa urban yang telah mengalami perubahan-perubahan, baik secara sosial, ekonomi, maupun budayanya. Pemerintahan Desa (Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan Desa) ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

Indonesia dalam Era Disrupsi Sep 04 2020 Dunia telah memasuki era revolusi industri keempat yang dicirikan oleh kehadiran internet of things. Keberadaan internet yang seolah tanpa batas menghadirkan era baru yang dikenal sebagai era disrupsi. Bagi Indonesia, era disrupsi adalah tantangan tersendiri. Era ini bisa menghadirkan imbas negatif bila kita tak benar-benar siap, dan sebaliknya, bisa begitu menguntungkan bila bisa memanfaatkannya secara optimal. Buku ini

menyajikan hasil kolaborasi pemikiran terkait bagaimana gambaran posisi Indonesia dalam era disrupsi, sekaligus langkah apa yang telah dan dapat dilakukan. Pemikiran yang tertuang merangkum berbagai bidang studi karena para penulis memiliki latar belakang studi yang berbeda-beda sehingga menghasilkan alur pemikiran yang khas. Tentu saja, muara dari masing-masing tema mengerucut pada upaya untuk melihat posisi dan strategi "Indonesia dalam Era Disrupsi".

Regulasi Desa Jan 20 2022 Buku ini berisi mengenai regulasi yang ada di desa. Regulasi desa dalam berbagai jenis dan bentuknya sangat diperlukan keberadaannya dalam proses dan praktik penyelenggaraan pemerintahan desa dengan segenap kewenangannya baik yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa. Desa memang bukan lagi sebagai tingkatan pemerintahan atau wilayah terendah di bawah Kabupaten Kota dan sudah ditetapkan kewenangannya melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Meskipun demikian Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dan berpemerintahan, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan seluruh kewenangannya hendaknya tetap taat asas dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harapannya penyelenggaraan pemerintahan desa dan urusan kepentingan masyarakat setempat benar-benar berjalan secara profesional, efisien, efektif, dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence Mar 10 2021 Journal of Information System Engineering and Business Intelligence (JISEBI) focuses on Information System Engineering and its implementation, Business Intelligence, and its application. JISEBI is an international, peer review, electronic, and open access journal. JISEBI is seeking an original and high-quality manuscript. Information System Engineering is a multidisciplinary approach to all activities in the development and management of information system aiming to achieve organization goals. Business Intelligence (BI) focuses on techniques to transfer raw data into meaningful information for business analysis purposes, such as decision making, identification of new opportunities, and the implementation of business strategy. The goal of BI is to achieve a sustainable competitive advantage for businesses.

Pertumbuhan pemerintahan daerah di negara Republik Indonesia Dec 27 2019 Indonesian local government.

Sistem Pemerintahan Apr 23 2022 Sistem pemerintahan kita memang perlu disempurnakan untuk melancarkan jalannya sistem penyelenggaraan pemerintahan, maupun kinerja aparatur negara dan aparatur pemerintah di dalam menyejahterakan dan melayani rakyatnya. Balai Pustaka

Pengantar Otonomi Daerah dan Desa May 24 2022 Buku ini merupakan sebuah pengantar awal yang masih memerlukan banyak penyempurnaan dari berbagai hal tetapi juga berbagai pihak yang berkepentingan. Untuk itu, berbagai saran dan kritik yang membangun sangat diperlukan guna penyempurnaan isi buku ini. Pembahasan dalam buku ini adalah: Bab 1 Kedudukan Daerah/Desa dalam NKRI Bab 2 Konsep Otonomi Daerah Bab 3 Konsep Otonomi Desa Bab 4 Wewenang Pemerintah Daerah Bab 5 Urusan Pemerintahan Bab 6 Organisasi Pemerintahan Daerah Bab 7 Organisasi Pemerintahan Desa Bab 8 Peraturan Daerah Bab 9 Peraturan Desa Bab 10 Keuangan Daerah Bab 11 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pemerintahan

Memimpin Reformasi Birokrasi Feb 09 2021 Buku ini merefleksikan pengalaman penulis saat menjadi Wakil Menteri PANRB 2011-2014. Sebagai Menteri PANRB masa itu, saya merasa sangat terbantu dengan pemikiran Pak Eko Prasjojo dalam mewujudkan gagasan Reformasi Birokrasi. Sinergi Menteri dan Wakil Menteri menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan RB. Buku ini dapat menjadi inspirasi bagi para penggerak RB di Indonesia. Selamat untuk Pak Eko Prasjojo. —Azwar Abubakar, Menteri Pan dan Rb (2011-2014) Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup

Manajemen Strategis Sep 16 2021 Pada saat ini, manajemen strategis merupakan kebutuhan setiap organisasi, baik publik maupun privat. Pada praktiknya, organisasi privat yang lebih dahulu melaksanakan manajemen strategis; karena memang organisasi privat lebih banyak dihadapkan pada ketidakpastian situasi lingkungan, diantaranya persaingan antar organisasi, perubahan teknologi dan gaya hidup masyarakat. Tetapi pada saat ini, organisasi sektor publik-pun dihadapi pada permasalahan yang hampir sama, walau dengan variabel lingkungan yang berbeda. Perubahan teknologi informasi dan gaya hidup masyarakat serta aspek ikutan lainnya, memaksa organisasi sektor publik melakukan penyesuaian-penyesuaian internal. Tujuannya adalah agar masyarakat terpuaskan dengan pelayanan yang diberikan; karena memang tujuan utama dari organisasi sektor publik adalah meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.

Tata Kelola Pemerintahan Desa Mar 22 2022 Buku ini membahas secara praktis dan lengkap mengenai tata kelola pemerintahan desa, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata cara penyusunan organisasi pemerintah desa, pengertian peraturan di desa, tata cara penyusunan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa, keputusan kepala desa, serta teknik penyusunan peraturan di desa. Pengertian administrasi pemerintahan desa, praktik tata kelola administrasi umum desa, administrasi penduduk desa, administrasi keuangan desa, administrasi pembangunan desa, administrasi desa lainnya, serta pelaporan, pembinaan, dan pengawasan administrasi pemerintahan desa. Arti penting tata kelola SPM desa, norma standar prosedur dan kriteria SPM desa, panduan operasional SPM desa, penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan, serta pemberian surat keterangan dan penyederhanaan pelayanan. Buku ini diharapkan membantu dan menambah semangat para praktisi pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Adapun bagi para akademisi/ dosen dan mahasiswa agar memudahkan dalam mengkaji mengenai pemerintahan desa dan tambahan informasi bagi masyarakat desa pada umumnya untuk semakin mengenal tata kelola pemerintahan desa di Indonesia.

Gagasan Manajemen Aug 03 2020 Manajemen juga dipandang sebagai ilmu yang mengajarkan proses mendapatkan tujuan dalam organisasi, sebagai usaha patungan dengan beberapa orang dalam organisasi. Jadi, ada orang yang merumuskan dan menerapkan tindakan manajemen yang disebut manajer. Buku ini terdiri dari 8 (delapan) bab, yaitu : Bab 1 Lingkungan Kompetitif Bab 2 Total Quality Management (TQM) Bab 3 Benchmarking Bab 4 Keunggulan Layanan Pengiriman Bab 5 Empowerment dan Engagement Bab 6 Organisasi Horizontal Bab 7 Organisasi Pembelajaran Bab 8 Era Pengetahuan: Teknologi Informasi dan Komputer

Korupsi Mengorupsi Indonesia Jul 14 2021 "Korupsi adalah masalah yang sangat membahayakan bagi Indonesia baik di masa kini dan masa mendatang. Apresiasi yang tinggi diberikan pada setiap usaha membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) karena memang seharusnya Indonesia bisa sedikit demi sedikit lepas dari KKN dan akhirnya terbebas darinya. Buku ini bukan sekadar bunga rampai atau kumpulan tulisan mengenai korupsi, melainkan ulasan komprehensif dari para pakar dan pejuang antikorupsi tentang berbagai aspek korupsi di Indonesia, sebagai akumulasi pengetahuan dan pengalaman 30-an pakar dari berbagai bidang yang berasal dari berbagai negara. Harapan para pakar, pejuang antikorupsi, dan kita semua adalah Indonesia yang bebas dari korupsi sehingga masyarakat luas bisa sejahtera karena terhindar dari dampak buruk KKN yang merusak tatanan perekonomian dan kesejahteraan yang berkeadilan."

Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi untuk Pelayanan Publik Jun 25 2022 Rendahnya kualitas pelayanan publik ini bermula pada satu pertanyaan signifikan, yaitu bagaimana sumber daya manusia penyelenggara pelayanan publik bekerja, mengingat sumber daya manusia atau birokratlah yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik. Sayangnya tak kalah dengan rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia, isu tentang rendahnya kemampuan aparat dalam penyelenggaraan layanan publik di Indonesia juga kian mengemuka. Lebih sayang lagi, gambaran suram kemampuan birokrat ini juga diperkuat oleh lemahnya birokrasi dalam hal manajemen sumber daya manusia.

Akuntansi Sektor Publik May 12 2021 Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayah Nyalah Buku ajar ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan semoga bisa bermanfaat sebagai media ajar bagi para mahasiswa yang mengambil mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, khususnya untuk mahasiswa semester 5 (lima) D3 Komputerisasi Akuntansi di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin, disamping itu buku ajar ini dapat digunakan sebagai salah satu literatur dalam memperkuat pemahaman terhadap akuntansi Sektor publik yang biasanya digunakan untuk pemerintahan maupun organisasi non profit. Buku Ajar ini disusun berdasarkan teori dan praktik yang di dapat oleh penulis baik dari bangku kuliah, maupun praktik di dunia kerja, beberapa kasus diambil dari hasil penelitian yang dilakukan dalam bidang akuntansi sektor publik. Buku Ajar ini juga dilengkapi dengan soal dan jawaban yang membantu pembaca semakin memahami Akuntansi Sektor Publik.

Panduan Belajar Dan Evaluasi: Pendidikan Kewarganegaraan: Untuk SD/MI Kelas 4 Apr 30 2020

Sistim pemerintahan kota dan pola pokok struktur organisasi administrasi Dec 19 2021 City administration.

Desain Inovasi Pemerintahan Daerah Feb 21 2022 Meskipun inovasi telah menjadi kosakata organisasi publik, khususnya di pemerintah daerah di Indonesia, namun prestasi ini belum menunjukkan hasil yang diinginkan. Buku ini menunjukkan ada tiga faktor krusial di dalam mengembangkan inovasi di pemerintahan daerah, yaitu: kepemimpinan, iklim organisasi, dan lingkungan politik. Dengan memperhatikan tiga komponen tersebut, yang kemudian dikenalkan sebagai LPC Model, buku ini memberikan jalan keluar, bagaimana mengembangkan inovasi di pemerintahan daerah.

Struktur organisasi pemerintahan desa di Propinsi Djawa Tengah, 1971 Oct 29 2022

Manajemen Perkotaan Nov 06 2020 Isu dan masalah perkotaan di negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya, khususnya di Indonesia sangat kompleks dibandingkan dengan yang terjadi di negara-negara industri maju. Masalah ekonomi berkaitan erat dengan masalah sosial dan politik. Pemenuhan kebutuhan perumahan atau peremajaan lingkungan kumuh berkaitan dengan ketersediaan lahan. Pengelolaan lingkungan merupakan salah satu tugas penting pemerintah dalam hal memberikan pelayanan keamanan dan kesehatan masyarakat kota serta e?siensi dalam belanja masyarakat. Manajemen lingkungan perkotaan merupakan unsur manajemen perkotaan yang mensyaratkan dipenuhinya pemberian otonomi dari pemerintah pusat kepada pemerintah kota, kejelasan fungsi atau kewenangan unit-unit baru yang dibentuk, integrasi internal antara lembaga pemerintah daerah dengan unit-unit pemerintah pusat di daerah, dan

koordinasi yang mantap antar unit-unit pemerintahan. Dalam buku ini akan dibahas beberapa tema dan sub-tema yang relevan mengenai implikasi dari pertumbuhan kota yang cepat terutama di Indonesia terhadap perubahan manajemen pemerintahan, konflik kepentingan dalam perebutan ruang, pelaksanaan rencana kota, pelayanan publik, dan analisis sosio-politik pada pengelolaan lingkungan.

Mimbar Jun 01 2020

Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia Edisi Kedua Nov 25 2019 Substansi utama isi buku ini antara lain memuat uraian permasalahan kepegawaian sipil di Indonesia, mulai dari sistem lama (terdahulu) hingga ke sistem yang terbaru—undang-undang kepegawaian sipil—yang mulai diberlakukan, perubahan paradigma pemerintahan, manajemen kepegawaian pemerintah, masalah kebijakan dan peraturan tentang pegawai negeri sipil, penataan birokrasi, dan proses manajemen kepegawaian sipil, serta alternatif solusi persoalan yang dihadapi dalam penataan dan pengelolaan kepegawaian sipil di Indonesia. Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup
FORMULASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) Dec 07 2020 Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan utama pemerintahan desa pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah rendahnya kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa, terutama pengetahuan dan kemampuannya dalam menyusun dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes secara benar. Buku ini secara rinci dan lengkap membahas tentang formulasi penyusunan RPJMDes, sehingga sangat bermanfaat bagi aparatur desa dan stakeholder lainnya yang mengelola masyarakat desa. Disajikan dengan Bahasa yang sederhana dan disertai dengan contoh, sangat praktis dan mudah dimengerti, oleh para administrator pemerintahan desa.

Manajemen Pelayanan Publik Feb 27 2020 Pelayanan publik hingga kini belum seperti yang diharapkan, seperti pelayanan yang lambat, berbelit-belit, dan tidak transparan. Oleh karena itu perlu dikelola dengan baik melalui manajemen pelayanan publik. Bab 1 Pengertian Pokok dan Ruang Lingkup Bab 2 Konsep dan Teori Manajemen Ilmu Pemerintahan Bab 3 Organisasi Pemerintahan Bab 4 Kepemimpinan Bab 5 Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Bab 6 Membangun Sistem Pelayanan Publik Bab 7 Manajemen Pelayanan Publik Dan Privat Bab 8 Perkembangan Manajemen Pemerintahan Bab 9 Manajemen Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Inklusif Bab 10 Keberhasilan Manajemen Pemerintahan Dan Kualitas Pelayanan Publik

BIROKRASI DAN GOVERNANSI PUBLIK Aug 23 2019 Adapun perkembangan Birokrasi Governansi Publik itu sendiri diwarnai dengan pergeseran paradigma birokrasi yang diwarnai problematika patologi birokrasi serta adanya deregulasi dan debirokratisasi yang tentunya diarahkan untuk mendukung terwujudnya reformasi birokrasi. Buku ini diperuntukkan bagi mahasiswa, pelajar yang sedang mempelajari konsep Birokrasi dan Governansi Publik serta perkembangannya khususnya di Indonesia maupun perkembangannya di belahan dunia lainnya. Dilengkapi dengan gambaran dampak globalisasi di era revolusi industry 4.0 dalam tata kelola pemerintah.

Korupsi APBD Jan 08 2021 Pasca reformasi 1998, berbagai produk hukum untuk menangani dan memberantas korupsi telah dilakukan oleh pemerintah. Hasilnya menunjukkan corruption perception index Indonesia nilainya semakin membaik, namun diikuti dengan korupsi yang semakin meningkat dan menyebar keseluruh daerah. Sedangkan berdasarkan hasil dari empat penelitian mengenai faktor faktor yang berpengaruh terhadap korupsi APBD menunjukkan adanya perbedaan. Dua peneliti menyebutkan bahwa perilaku individu, kelembagaan pemerintahan, peraturan perundangan-undangan, dan pengawasan berpengaruh terhadap korupsi APBD, sedangkan satu peneliti lainnya menyatakan bahwa dari keempat variabel tersebut hanya perilaku individu yang tidak berpengaruh terhadap korupsi APBD. Sedangkan satu peneliti lainnya menunjukkan bahwa kelembagaan dan pengawasan tidak berpengaruh terhadap korupsi APBD. Hasil ini menyebabkan ketidakpercayaan apakah faktor-faktor yang diwujudkan dengan perilaku individu, kelembagaan pemerintahan, peraturan perundangan-undangan, dan pengawasan berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap terhadap Korupsi APBD. Meta analisis digunakan untuk mengatasi hasil penelitian yang berbeda. Meta analisis merupakan penelitian yang menggunakan studi-studi yang telah ada yang dilakukan dengan pendekatan kuantitatif untuk memperoleh kesimpulan yang akurat. Dari empat penelitian, hanya 3 penelitian yang memenuhi persyaratan untuk diolah, dengan total data 615 responden. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut berpengaruh terhadap korupsi APBD. Penggantian Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Tentang Perangkat Daerah telah dilaksanakan dengan tujuan menghindari kebocoran APBD. Dari keempat variabel tersebut perilaku individu kepala daerah masih terabaikan. Sehingga perlu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi niat kepala daerah melakukan tindak korupsi. Planned Behavior Theory digunakan untuk menjelaskan faktor niat individu dalam berperilaku Metode tabulasi frekwensi, cross tabulasi dan pengujian chi square digunakan untuk memproses data. Sumber data berasal dari profil kepala daerah yang terpilih pada pemilihan kepala daerah tahun 2015, yang berjumlah 1.051 orang. Hasil penelitian menunjukkan jabatan, gender dan umur merupakan faktor yang mempengaruhi kepala daerah untuk melakukan tindakan korupsi APBD. Hasil penelitian ini merekomendasikan penyelenggara pemilihan umum kepala daerah (pilkada) untuk mengevaluasi persyaratan calon kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi pilkada dan partai pengusung calon kepala daerah memberi kesempatan yang lebih besar kepada kelompok perempuan dan generasi milenial, mengingat dua kelompok ini cenderung untuk tidak berperilaku korupsi. Sebuah Meta Analisis ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak*

Administrasi negara Sep 23 2019

Sejarah Departemen Tenaga Kerja, Republik Indonesia Mar 30 2020 History of the Dept. of Manpower, Republic of Indonesia.

Menuju Indonesia Makmur yang Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan Melaksanakan Nilai-Nilai Agama dalam Keragaman Agama (Dua Puluh Dua Tahap Membangun Negeri) Jan 28 2020 Pembahasan mengenai reformasi birokrasi dan pembinaan aparatur negara mendapat porsi pembahasan terbesar. Birokrasi diibaratkan sebagai kendaraan yang digunakan menuju tujuan perjalanan. Apabila kendaraan mengalami kerusakan dan kelambatan kinerja, tentunya segala tujuan yang telah direncanakan tidak akan tercapai semestinya. Pembahasan terkait kepegawaian mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, dan belum mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, hal tersebut disebabkan penyusunan buku ini dilakukan sebelum 17 Agustus 2011 (sebelum berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2014). Namun, di sisi yang lain, beberapa isu yang mengemuka dalam ranah rancangan legislasi nasional dan belum diundangkan, penulis menuliskannya sebagai bagian dari isu yang diadopsi dalam buku ini.

Struktur organisasi pemerintahan desa dalam Propinsi Jawa Timur Sep 28 2022

Good Corporate Governance (GCG) Jul 22 2019 Buku ini disusun untuk bisa memberikan bahasan yang cukup lengkap mengenai tata kelola organisasi/perusahaan yang baik (good corporate governance), mulai dari konsep, ruang lingkup, teori, prinsip, struktur dan peran organ, serta penerapan good corporate governance dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan, kinerja organisasi, budaya organisasi, etika organisasi, hingga peran GCG terhadap pencegahan tindak kecurangan (fraud). Secara rinci buku ini membahas: Bab 1 Konsep dan Ruang Lingkup Good Corporate Governance Bab 2 Teori-Teori Good Corporate Governance (GCG) Bab 3 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) Bab 4 Struktur dan Peran Organ GCG Bab 5 Penerapan Good Corporate Governance Bab 6 Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Bab 7 Kinerja Organisasi dan Good Corporate Governance (GCG) Bab 8 Budaya Organisasi Bab 9 Dimensi Etika dalam Praksis Bisnis Bab 10 Corporate Social Responsibility dan GCG Bab 11 GCG dan Praktik Kecurangan (Fraud)

Sejarah pengaruh Pelita terhadap masyarakat pedesaan di Nusa Tenggara Barat Jul 02 2020

Manajemen Pemerintahan Desa Oct 05 2020 Desa mengalami pergeseran kedudukan, peran dan tata kelola seiring berubahnya kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Desa pernah berkedudukan sebagai daerah otonom tingkat III dan saat ini kembali menjadi bagian dari Daerah Kabupaten/Kota. Peran dan tata kelola pemerintahan desa yang dahulu lebih dominan berperan sebagai perpanjangan tangan dan bagian dari pemerintah daerah telah bergeser karena mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul dan hak tradisionalnya, sebagaimana yang dimandatkan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan konstruksi menggabungkan fungsi local self government dan self-governing community, Desa mempunyai kewenangan yang sangat luas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dan memajukan adat, tradisi, dan budaya yang telah hidup pada masyarakat desa. Kewenangan desa sebagaimana dimaksud mencakup kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan berbagai kewenangan tersebut dapat dikuatkan dengan penetapan produk hukum desa (Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa).

Handbook Pemerintahan Daerah Oct 17 2021 Kebijakan otonomi daerah di Indonesia yang berjalan sejak kemerdekaan Indonesia, banyak mengalami perubahan paradigma. Paradigma pelimpahan urusan pemerintahan yang tepat diterapkan di Indonesia, masih belum menemukan posisi yang tepat. Tarik menarik urusan pemerintahan antara pusat dan daerah banyak ditentukan oleh kepentingan politik. Belum nyamannya posisi “bandul otonomi daerah” menandakan bahwa belum sepakatnya para ahli mengenai kebijakan desentralisasi di Indonesia. Belum terbentuknya paradigma yang dianggap tepat, tentunya dapat mengganggu perkembangan daerah-daerah di Indonesia, dan hal ini juga dapat berpengaruh pada perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara menyeluruh. Dapat dipahami bahwa memang tidak ada sesuatu yang sempurna dari kebijakan yang dibuat suatu rezim pemerintahan, namun setidaknya diperlukan pemikiran bersama dari para cendikia untuk perkembangan daerah-darah di Indonesia, sehingga diperlukan kebijakan otonomi daerah yang dapat dilengkapi dengan kebijakan turunannya dengan cepat sehingga pemerintah daerah dapat menerapkannya dengan baik. Tentunya pula diperlukan dukungan dari para cendikia untuk memberikan solusi permasalahan dalam penerapan otonomi daerah. Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai paradigma

kebijakan otonomi daerah tersebut, kebijakan tersebut harus tetap dilaksanakan sebagai penerapan hasil kesepakatan kepentingan politik di masa kini, maka dari itu buku dengan judul Handbook Pemerintahan Daerah ini memperjelas kebijakan otonomi daerah, hubungan pemerintahan pusat dan daerah, penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, beserta sejarah pemerintahan daerah. Buku ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi para pelajar, mahasiswa, aparat pemerintahan, tenaga pengajar dan pemerhati pemerintahan daerah. Diharapkan pula buku ini dapat membuka wawasan mengenai ilmu pemerintahan, utamanya pemerintahan daerah serta memberikan pandangan berbeda yang dapat diterapkan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

PKn-Pend.Kewarganeg SD/MI Kls 4 Nov 18 2021